



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	12 (dua belas)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, dan Kepala BP BATAM.
Hari, Tanggal	:	Selasa, 31 Agustus 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E, M.A, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020; 2. <i>Progress</i> Realisasi Anggaran TA 2021; dan 3. Pembahasan RKA KL TA 2022.
Hadir	:	1. 42 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Kepala BSN; b. Ketua KPPU; c. Kepala BP Batam; d. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BSN, Ketua KPPU dan Kepala BP Batam pada pukul 13.41 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU dan Kepala BP Batam pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E, M.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

I. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional selama 12 (*dua belas*) tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Standardisasi Nasional untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran reguler tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2021 per 27 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp104.034.659.682,- (*Seratus Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp190.278.942.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau sebesar 54,7%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan B.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp219.677.133.000 (*Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp149.867.260.000 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp69.809.873.000 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2022 dalam rangka peningkatan kemampuan pengukuran SNSU dan mengacu kepada Undang Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan PP turunannya yaitu PP No.7/2021 sebesar Rp34.000.000.000 (*Tiga Puluh Empat Miliar Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Pengadaan alat laboratorium SNSU sebesar Rp22.000.000.000 (*Dua Puluh Dua Miliar Rupiah*).
 - b. Fasilitas dan Pembinaan UMKM sebesar Rp12.000.000.000 (*Dua belas Miliar Rupiah*).

II. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 9 (*sembilan*) tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2021 per 30 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp70.798.064.290 (*Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp121.141.662.000 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau sebesar 58,44%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp99.726.648.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp14.130.428.000 (*Empat Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - b. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp16.408.023.000 (*Enam belas Miliar Empat Ratus Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja Pegawai sebesar Rp44.120.992.000 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*)
 - d. *Belanja Operasional* sebesar Rp25.067.205.000 (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022 sebesar Rp176.215.152.000 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Duar Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

III. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi BP Batam atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan BP Batam selama 5 (*lima*) tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong BP Batam untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran belanja BP Batam tahun 2021 per 30 Juni 2021 baru mencapai sebesar Rp603.058.993.310 (*Enam Ratus Tiga Miliar Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp2.450.075.127.000 (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar 24,61%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp2.273.250.629.000 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp938.471.214.000 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.334.779.415.000 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan target PNBPN dan belanja dalam usulan Pagu Alokasi Anggaran BP Batam tahun 2022 sebesar Rp49.904.696.000 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

IV. BSN, KPPU dan BP Batam

1. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Standardisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan BP Batam untuk melaksanakan kegiatan di masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing dan juga terkait dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Standardisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan BP Batam untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.36 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



Martin Manurung, S.E., M.A.
A-352